

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, kenyataan pluralitas agama merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan lagi. Pluralitas itu tampak pada tradisi keyakinan yang berbeda yang dapat ditemukan di wilayah, negara atau benua mana pun.¹ Keragaman tradisi keyakinan ini menandakan bahwa manusia memiliki keunikan dan kekhasannya. Manusia mempunyai perspektif personal akan realitas dunia, tempat manusia berpijak dan terhadap realitas di luar dirinya. Secara historis, pluralitas agama muncul karena ada perjumpaan antara agama-agama pribumi dan agama yang datang dari “dunia” luar. Agama pribumi sebagai sistem kepercayaan yang berasal dan berkembang dalam suatu kelompok dan budaya tertentu. Sebaliknya, agama yang berasal dari “dunia” luar merupakan agama yang berkembang lewat usaha penyebaran kepada kelompok dan budaya tertentu.² Dalam kenyataan, pluralitas agama ini memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan pelbagai tradisi keagamaan turut berkontribusi dalam seluruh tatanan hidup bersama melalui nilai-nilai spiritual dan moralnya. Nilai-nilai tersebut mengarahkan manusia dalam menentukan dan membangun hidupnya. Dalam hal ini, tradisi-tradisi keagamaan merupakan penggerak bagi manusia untuk mencari dan menemukan makna hidup.

Meskipun demikian, keragaman tradisi agama terkadang berpotensi konflik dalam kehidupan masyarakat. Agama-agama mengambil bagian dalam menciptakan ketidaktentraman dalam hidup bersama. Keberagaman kerap kali menimbulkan implikasi sosial yang kompleks, yang kemudian menjelma menjadi konflik dan penderitaan. Hal ini memang sangat mungkin karena keragaman tidak jarang memicu masyarakat untuk berjuang dan bersaing satu sama lain untuk menyatakan sikap dominasi di tengah kelompok-kelompok agama lain. Pluralitas agama pada satu sisi turut memperkaya dan melestarikan peradaban hidup

¹James A. Beckford, “Re-Thinking Religious Pluralism”, dalam buku Giuseppe Giordan dan Enzo Pace (eds.), *Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary World* (Jakarta: Springer, 2014), hlm. 21.

²Am Hardjana, *Penghayatan Agama: yang Autentik dan tidak Autentik* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 9.

manusia, tetapi pada sisi lain pluralitas agama dapat menjadi ancaman bagi peradaban itu sendiri. Paul Hirst dalam Beckford menerangkan bahwa kehidupan komunitas yang plural dengan aturan dan standar masing-masing seringkali memicu pertentangan.³

Negara Indonesia dikenal sebagai negara multi-religius karena terdiri dari pelbagai agama seperti, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dari keenam agama di atas, Islam merupakan agama dengan persentase terbesar di antara agama-agama lain.⁴ Fakta pluralitas agama ini memperlihatkan kekayaan dan kekhasan bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain. Negara Indonesia dipandang sebagai bangsa religius di mata dunia. Berkaca pada sejarah, peran agama sangat penting dalam menuntun perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Agama memainkan perannya sebagai lembaga moral dalam membangun peradaban hidup bangsa Indonesia. Agama menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Agama merupakan landasan etos nasionalisme yang memungkinkan warga negara berjuang mencapai tujuan hidup bersama.⁵ Peran serta ini tampak pula dalam ajaran-ajaran moral agama yang mengarahkan para pemeluknya untuk bersikap benar, beradab dan bertanggung jawab baik itu terhadap negara yang berlandaskan Pancasila, sesama yang lain, alam semesta maupun terhadap Tuhan yang diimani oleh setiap pemeluk. Sebagai kekuatan moral dan etik, agama memiliki kaidah-kaidah yang berfungsi memberikan tuntunan dan pedoman hidup dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.⁶

Namun, tidak dapat dibantahkan pula bahwa keberagaman agama di Indonesia masih menjadi masalah. Negara Indonesia belum terbebas dari pelbagai tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama agama yang selalu ditujukan kepada kelompok-kelompok agama tertentu. Agama sebagai landasan spiritual, moral dan

³James A. Beckford, *log.cit.*

⁴Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2018, 86,7% dari 267.670.543 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Indonesia merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia), 7,6% Kristen Protestan, 3,13% Kristen Katolik, 1,74% Hindu, 0,77% Buddha, 0,03% Konghucu, 0,04% agama lainnya. https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, diakses pada tanggal 30 September 2021.

⁵H. M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 81.

⁶Abd. Rasyid Rahman, "Peran Agama Dalam Memperkuat Integrasi Nasional", dalam *Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences*, Vol. 12. No. 1, April 2017, hlm. 101-109.

etik belum diaktualisasikan secara bertanggung jawab. Agama yang telah dicirikan sebagai pemersatu; sebagai aspirasi manusia yang paling sublim; sebagai sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu; sebagai sesuatu yang memuliakan dan membuat manusia beradab justru telah mempertinggi fanatisme dan sifat tidak toleran.⁷ Pluralitas agama kerap kali memicu krisis toleransi. Pluralisme religius seringkali diwarnai dengan berbagai benturan, konflik, kekerasan, permusuhan, bahkan perang yang dilandasi sentimen keagamaan. Beberapa kasus yang dapat diangkat misalnya kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-14 Mei 1998, konflik etnis Dayak-Madura di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999, Maluku pada tahun 2000-2001, darurat sipil di Aceh, dan konflik Muslim-Kristen di Poso sejak Desember 1998.⁸

Kasus lain yang mengundang perhatian nasional dan internasional adalah penerapan regulasi daerah tentang kewajiban menggunakan pakaian muslim di sekolah negeri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Walikota yang mewajibkan siswi sekolah umum mengenakan jilbab. Regulasi ini mendorong sejumlah siswi non-muslim terpaksa mengenakan jilbab ke sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya karena enggan berpolemik dan ingin selesai sesuai jadwal sekolah (*Majalah Tempo*, 21 April 2008). Beberapa kasus lain juga yang sering muncul ke permukaan, seperti soal pendirian rumah ibadah baru, pendirian bangunan terkait kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial yang dicurigai bermotif proselitisasi. Kasus-kasus ini menjadi isu yang terus muncul di Indonesia, seperti kasus pelarangan pendirian rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia oleh Pemerintah Kota Bogor dan juga mayoritas masyarakat Muslim di kota Bogor (97,12%) yang menentang keras pembangunan Gereja tersebut karena dianggap sebagai bagian dari proses pemurtadan warga Muslim; kasus pelarangan pembangunan Masjid Nur Musofir di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh masyarakat setempat; kasus penyerahan Masjid Jemaat

⁷Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1966), hlm. 2.

⁸Di era transisi pasca-tumbangnya orde baru tahun 1998, fenomena kekerasan keagamaan merajalela. Pada tahun 1999, jumlah insiden tercatat 300 kasus dengan 1.813 korban tewas. Kasus bertambah pada tahun 2000 menjadi 408 insiden dengan 1.617 korban. Pada tahun 2001 jumlah insiden menjadi 233 dengan korban tewas 1.069 orang. Dalam pelbagai penelitian ditemukan bahwa melemahnya kekuasaan negara menjadi akar merebaknya konflik horizontal di negara Indonesia. Bdk. Alamsyah M. Djafar, "Intoleransi-Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 175.

Ahmadiyah Karanganyar, Jawa Tengah kepada warga Kalisoro demi menghindari tindakan anarkis.⁹ Berlarut-larutnya kasus-kasus ini menegaskan defisitnya penghargaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan bahwa persoalan-persoalan ini sebetulnya sudah menggurita dalam negara Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia kehilangan rasa kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pelbagai contoh kasus di atas menggambarkan bahwa agama sering kali menjadi biang konflik yang menyembul ke permukaan hidup bersama, tidak hanya berakibat pada agama itu sendiri, tetapi juga semua segi kehidupan. Sikap mengabsolutkan ajaran agama serta ajaran para pemimpin agama (dogmatisme absolut dan pengkultusan tokoh tertentu), menempatkan keyakinan agama sebagai kebenaran yang absolut-eksklusif (*truth claim*) serta persaingan untuk menyatakan agama siapa satu-satunya yang suci dan benar merupakan benih-benih permusuhan di antara umat beragama.¹⁰ Kaum beragama terperangkap dalam jaring dogmatisme, absolutisme, eksklusivisme, ekstremisme, puritanisme dan fanatisme sempit. Perang dogmatis ini menjelma dalam fenomena radikalisme dan fundamentalisme yang mengoyak keutuhan hidup bersama. Setiap agama mengklaim diri sebagai pihak yang paling sah menyalurkan pesan keselamatan dibandingkan dengan agama-agama lain. Dalam hal ini, masing-masing agama mengklaim diri sebagai pihak yang paling berkompeten untuk menyelamatkan manusia dari pelbagai kepedihan, kesulitan, dan kerentanan selama hidup di muka bumi ini.¹¹

Pluralisme religius ini pun semakin ditandai dengan permusuhan dan konflik yang mengarah pada sikap separatis. Hubungan dengan kelompok agama lain kerap kali dibangun atas dasar prasangka dan ketakutan. Kaum beragama menjadi takut akan kehadiran kelompok agama yang berbeda. Kelompok agama lain dipandang “musuh” yang harus diwaspadai bahkan perlu dibasmi. Sudah tentu bahwa cara berpikir ini melahirkan situasi penindasan. Hal ini terungkap

⁹Zainal Abidin Bagir dan Mustaghfiroh Rahayu, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011* (Yogyakarta: Program Studi Lintas Agama dan Budaya, 2012), hlm. 31.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 30.

¹¹M. Amin Abdullah, “Memutus Mata Rantai Kekerasan Antarumat Beragama” dalam Robert B. Baowollo (ed.), *Menggugat Tanggung Jawab Agama-Agama Abrahamik Bagi Perdamaian Dunia* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 100.

nyata melalui tindakan kekerasan fisik, kekerasan simbolik dan kekerasan struktural yang juga terus mewarnai ritme hidup bangsa Indonesia yang bercorak multi-agama dan multi-etnik. Ada tiga hal yang memungkinkan keadaan ini.¹² *Pertama*, ketakutan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang dinilai semakin menguasai bidang-bidang kehidupan, seperti politik, budaya dan ekonomi. Realitas ini menimbulkan kecemasan masyarakat mayoritas. Dalam hal ini, kelompok minoritas dipandang sebagai ancaman berbahaya bagi kelompok mayoritas. Karena itu, kelompok minoritas sering kali mendapat tekanan dari kelompok mayoritas. Pandangan bahwa kelompok minoritas ini “berbahaya” berubah menjadi aksi kekerasan terhadap kelompok tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kelompok minoritas menjadi korban dari arogansi mayoritas. *Kedua*, adanya kekuatan tersembunyi dari kelompok minoritas yang dapat menghancurkan kelompok mayoritas. Kaum mayoritas berpandangan bahwa sewaktu-waktu kelompok minoritas perlahan-lahan bangkit menjadi kelompok penentang keberadaan mereka. *Ketiga*, proselitisme yang dilakukan oleh minoritas. Adanya ketakutan bahwa kelompok-kelompok minoritas melakukan penyebaran agama (proselitisme) yang dapat mengganggu iman personal kaum mayoritas. Ketiga pandangan di atas sebetulnya dibangun atas dasar sikap anti-keberagaman.

Berdasarkan konteks kehidupan beragama yang plural dan disertai dengan konflik inilah, agama-agama didesak untuk untuk merevitalisasi orientasi dasar eksistensinya. Agama-agama berperan menghadirkan kehendak Allah yang diimani melalui upaya penegakan cinta persaudaraan, perdamaian dan kesatuan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks pluralisme agama kontemporer yang ditandai dengan keragaman dan klaim kebenaran, agama-agama harus mematahkan kesempitan berpikir yang “mencekik” rumah agama, lembaga dan bahkan komunitas keagamaan dengan memiliki kerendahan hati intelektual dan spiritual yang mendalam (*kenosis* atau pengosongan dalam istilah Kekristenan dan Yahudi).¹³ Di sini, agama-agama perlu menyadari keterbatasannya dan karena itu diperlukan komunitas kepercayaan lain untuk memperbaiki, melengkapi,

¹²Silvester Kanisius L, *Allah dan Pluralisme Religius* (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 153-154.

¹³Vladimir Latinovic, Gerard Mannion, and Peter C. Phan (eds.), *Pathways for Interreligious Dialogue in The Twenty First Century* (London: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 7.

menyempurnakan dan dengan itu pula menyempurnakan milik sendiri.¹⁴ Dengan kesadaran penuh, agama-agama dapat membangun sinergi dan kerja sama dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan tujuan keberadaannya. Dengan kata lain, hal yang hendak ditekankan ialah kesadaran untuk terus membuka ruang pertemuan yang autentik, yaitu dialog antaragama untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.

Gereja Katolik merupakan salah satu institusi religius di Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya mempertahankan kohesivitas antarumat beragama. Gereja Katolik lahir di bumi Indonesia, memiliki negara Indonesia dan oleh karenanya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Diakui atau tidak, Gereja Katolik memiliki andil yang cukup besar dalam melahirkan dan mempertahankan Republik Indonesia. Ketika terjadi pertentangan politik sejak tahun 1945 sampai 1965 terkait pelbagai kelompok yang mengejar kekuasaan politik menurut ideologi masing-masing, yaitu ideologi Islam (dari golongan Muslimin) dan Komunis (dari golongan komunis), Gereja (Umat Katolik) tetap menampilkan citranya dengan jelas di bidang politik yakni tetap menerima dan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai landasan nasional.¹⁵ Kemudian ketika menjelang Indonesia diubah menjadi Negara Indonesia Serikat, semua orang Katolik dari seluruh Indonesia di bawah pimpinan tokoh-tokoh Katolik yang berpengaruh seperti Mgr. Soegijapranata dan Ignasius Kasimo menyelenggarakan Kongres sejak tanggal 7-12 Desember 1949. Kongres ini berhasil membentuk Persatuan Partai Katolik Indonesia dengan tujuan untuk menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik.¹⁶

Sejak tahun 1945 sampai sekarang, Gereja Katolik masih belum pernah absen dari perjuangan mengisi pembangunan bangsa. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, Gereja tetap berusaha memelihara iman dan berjuang dengan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Peran penting Gereja Katolik dalam pembangunan bangsa baik dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan semakin kuat tatkala Gereja di Indonesia menerima hierarkinya sendiri pada tanggal 03 Januari 1961 dengan membentuk Majelis Agung Waligereja Indonesia. Misalkan pada tahun 1970, MAWI menerbitkan Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia yang menguraikan secara khusus bagaimana semua orang bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat. Hal lain juga yang dibicarakan dan diupayakan ialah soal Gereja Katolik membangun kerja sama dengan agama-agama lain dan di antara umat Kristen. Bdk. Huub J.W.M. Boelaars, OFM Cap. *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 147.

¹⁶*Ibid.*, hlm.126.

gigih menegakkan kebenaran dan keadilan seperti yang dimandatkan oleh Yesus Kristus. Statusnya sebagai warga Kerajaan Allah telah dibuktikan dalam kehadirannya sebagai pelaku firman yang tidak berkompromi dengan kejahatan. Maka sebagai murid Yesus, orang Gereja harus berusaha keras menjadi garam dan terang. Gereja bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya negara Indonesia. Di bawah terang prinsip harkat dan martabat manusia, Gereja terus mengakui dan melindungi hak-hak asasi dari manusia sebagai ciptaan Allah yang diberi kebebasan untuk memilih, bersekutu dan beribadah.

Peran Gereja Katolik masih sangat relevan dan aktual. Di tengah kemajuan dan pluralitas hidup bersama yang kian mengoyak, Gereja harus tetap memperjuangkan suatu kehidupan bersama yang lebih harmonis dan damai. Gereja Katolik dapat menjadi pioner dalam membangun kerja sama untuk kehidupan bangsa yang bermartabat. Karena itu, tulisan ini coba melihat peran Gereja Katolik dalam terang Ensiklik *Fratelli Tutti*. Ensiklik yang ditulis oleh Paus Fransiskus ini membicarakan secara khusus persaudaraan dan martabat manusia. Dengan bertolak dari ensiklik ini, Gereja Katolik dapat menemukan cara baru dalam berdialog dan dapat menjadi instrumen yang merobohkan tembok perbedaan dan menjadi jembatan persaudaraan bersama agama-agama lain. Tugas perutusan Gereja ialah keselamatan yang nyata dalam persatuan dengan Allah dan sesama, suatu kesatuan bukan dalam keseragaman, melainkan dalam keanekaan yang diperdamaikan.¹⁷

Dialog Gereja Katolik bersama dengan agama-agama lain dapat menjadi salah satu metode atau alternatif untuk memperkuat persatuan dan kesatuan semua anak bangsa. Dalam hal ini, Gereja harus tetap terbuka terhadap golongan beragama lain, yang menjalin dialog dengan gereja-gereja Kristen dan dengan umat beragama lain serta menghargai dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang serasi dengan cita-cita Gereja Katolik itu sendiri.¹⁸ Atas dasar ini, penulis mengulas tulisan ini dengan judul: **“SUMBANGSIH ENSIKLIK *FRATELLI TUTTI* BAGI GEREJA KATOLIK DALAM USAHA MEMBANGUN DIALOG ANTARAGAMA DI INDONESIA.”**

¹⁷Georg Kirchberger, *Allah Menggugat* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 702.

¹⁸Georg Kirchberger, “Gereja Katolik Indonesia Dalam Perspektif Para Uskup Indonesia”, *Berbagi*, 1:1 (Jakarta: LIPI, Januari 2012), hlm 28.

1.2 Masalah Pokok Studi

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok studi yang mau dibahas ialah bagaimana sumbangsih Ensiklik *Fratelli Tutti* bagi Gereja Katolik dalam usaha membangun dialog antara-agama di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini merupakan proses untuk mencapai beberapa tujuan berikut. *Pertama*, tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sumbangsih Ensiklik *Fratelli Tutti* bagi Gereja Katolik dalam usaha membangun dialog antaragama di Indonesia. *Kedua*, tulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapat gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan ensiklik *Fratelli Tutti*, kemudian pelbagai sumber yang berhubungan dengan Gereja Katolik dan dialog antar-agama yang dialami oleh penulis untuk memperkaya tulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang biografi Paus Fransiskus dan beberapa karya-karyanya. Setelah itu, penulis akan membahas tentang *Ensiklik Fratelli Tutti*, latar belakang diterbitkan ensiklik tersebut dan poin-poin penting yang termuat di dalamnya.

Bab III penulis akan menjelaskan pengertian dialog dan membahas dialog antaragama di Indonesia.

Bab IV penulis membedah sumbangsih ensiklik *Fratelli Tutti* bagi Gereja Katolik dalam usaha membangun dialog antaragama di Indonesia.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.